

ANALISIS MANAJEMEN PERSAMPAHAN DI KOTA BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

Risnawati K

Jurusan Teknik PWK, UIN Alauddin Makassar
risnawati.k@uin-alauddin.ac.id

Diterima (received): 14 April 2021

Disetujui (accepted): 07 Agustus 2021

ABSTRAK

Penelitian ini tentang manajemen persampahan di Kota Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Pokok permasalahannya adalah bagaimana manajemen persampahan di Kota Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Masalah ini dilihat dari kondisi secara fisik permasalahan sampah yang muncul di Kota Bantaeng. Maka, dengan demikian penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melihat sistem manajemen persampahan di Kota Bantaeng dan identifikasi sistem penanganan sampah saat ini yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan wilayah pengamatan atau sesuai data yang diperoleh dalam bentuk penguraian dan analisis dan dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi fisik yang ada dilokasi penelitian guna mengantisipasi permasalahan sampah di masa yang akan datang di Kota Bantaeng.

Kata Kunci : analisis, manajemen, persampahan

A. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia, baik kota besar atau kota kecil, tidak memiliki penanganan sampah yang baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama, yaitu dengan metode “kumpul-angkut buang”. Sebuah metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan, tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan (proses *open dumping*).

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah 395.83 km² dan berpenduduk sebanyak 196.716 jiwa (2021). Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penduduk, salah satunya adalah penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk sarana dan prasarana persampahan. Karena pada dasarnya, masalah persampahan terkait erat dengan perkembangan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat dalam pola pembuangan sampah yang saat ini sudah menjadi semakin kompleks di setiap daerah, termasuk di Kota Bantaeng.

Permasalahan eksisting dari sistem penanganan sampah di Kota Bantaeng adalah masih terbatasnya kinerja pelayanan, karena keterbatasan sarana pengumpul dan pengangkut sampah yang berkinerja andal, lokasi TPA sampah eksisting yang masih dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka (*open dumping*), serta manajemen persampahan yang belum memadai. Produk pengaturan di tingkat

nasional telah mensyaratkan ketentuan perlindungan air baku melalui penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai seperti penerapan proses lahan urug terkendali/*controlled landfill* (untuk kota kecil dan kota sedang) dan proses lahan urug saniter/*sanitary landfill* (untuk kota besar dan kota metropolitan). Dengan telah disahkannya Undang-Undang Pengelolaan Sampah pada tanggal 9 April 2008, paling lama setelah 5 tahun, tidak diperkenankan lagi praktik pengoperasian TPA sampah dengan proses pembuangan terbuka. Selain itu, telah dimunculkan adanya ketentuan penerapan pengurangan dan pemanfaatan sampah melalui program 3R, serta tuntutan akan permukiman yang bersih dan sehat dan target akses universal (100) % akses untuk sektor persampahan se-Indonesia), dimana hal ini berdampak pada terdorongnya kebutuhan akan pelayanan persampahan. Peningkatan pelayanan persampahan seringkali dilakukan tanpa suatu kebijakan dan perencanaan sebagai acuan yang jelas, sehingga menyulitkan para pelaksana di lapangan. Hal tersebut diperkuat dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan yang menyatakan bahwa setiap kota/kabupaten wajib untuk memiliki Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), yang berlaku untuk minimal 20 tahun untuk Kota Kecil dan Kota Sedang. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan sampah di Kota Bantaeng melalui pengelolaan yang komprehensif dalam jangka waktu panjang secara keseluruhan, diperlukan perencanaan teknis manajemen persampahan yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada sistem manajemen persampahan di Kota Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

2. Metode Pendekatan

Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini bersumber dari beberapa instansi terkait seperti Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, dengan jenis data sebagai berikut :

- a. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung pada objek penelitian. Survey ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif objek studi. Jenis data yang dimaksud meliputi :
 - 1) Kondisi fisik wilayah
 - 2) Pola penggunaan lahan
 - 3) Prasarana persampahan
 - 4) Sarana Persampahan
- b. Data sekunder dengan observasi pada instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian jenis data yang dimaksud meliputi :
 - 1) Geografi wilayah/administrasi

- 2) Klimatologi
- 3) Geologi
- 4) Pola pemanfaatan lahan
- 5) Topografi
- 6) Hidrologi
- 7) Demografi
- 8) Fasilitas/Utilitas Kawasan

3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana manajemen persampahan di Kota Bantaeng Kabupaten Bantaeng saat ini menggunakan analisis deskriptif dengan melihat sistem manajemen persampahan yang dilaksanakan di Kota Bantaeng serta identifikasi sistem pengelolaan sampah yang berkembang disekitarnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kota Bantaeng

Letak Ibukota Kabupaten Bantaeng berada dipesisir pantai Kota Bantaeng sekitar 123 Km arah Selatan Kota Makassar, dapat ditempuh sekitar 2 sampai 2,5 jam dengan kendaraan mobil. Daerah ini berada pada posisi 5' 12' 13" sampai 5' 35' 26" lintang selatan dan 119' 51' 42" sampai 120' 05' 27" bujur timur.

Bantaeng mempunyai iklim tropis basah. Bulan Oktober sampai Maret merupakan musim hujan, dan musim kemarau jatuh antara bulan April sampai bulan September. Temperature udara rata-rata 18 sampai 28° C. Wilayahnya terdiri pesisir pantai (lautan), lembah daratan (daratan rendah) dan bukit pegunungan (daratan tinggi) yang dikenal dengan kabupaten tiga dimensi dan daerah tiga klaster yang berada pada ketinggian 0 sampai 1.000 meter dpl (diatas permukaan laut).

Kota Bantaeng secara umum dikenal sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan yang memiliki image pelayanan kebersihan kota yang cukup baik. Kota Bantaeng sendiri pada tahun 2010 juga merupakan salah satu kota peraih Anugrah ADIPURA. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantaeng sangat peduli terhadap keseimbangan lingkungan dan tatanan birokrasinya.

Pembangunan di bidang kependudukan adalah merupakan titik sentral pembangunan secara umum. Salah satu fokus penting dalam pembangunan sosial dan kependudukan adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pengembangan kawasan perkotaan, maka sumber daya manusia beserta elemen pendukungnya memegang peranan yang cukup penting dan strategis dalam mendorong perkembangan berbagai aktivitas dalam kawasan perkotaan. Di samping itu, bahwa perencanaan adalah program berbagai tindakan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Defenisi ini sangatlah sederhana namun tidak demikian halnya dalam menyusun rencana kota itu sendiri. Pada prinsipnya, perencanaan disusun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan pada pemenuhan kebutuhan dasar tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu konsepsi dasar dalam perencanaan pembangunan adalah dengan menemukenali karakteristik penduduk secara keseluruhan baik dalam skala kota maupun skala wilayah dan daerah. Terlepas dari hal tersebut maka aspek sosial perlu diperhatikan untuk kelancaran suatu pembangunan wilayah baik secara lokal maupun regional. Pengetahuan tentang kependudukan yang menyangkut berbagai hal tersebut tadi dapat disimpulkan dalam dua golongan utama yaitu terkait dengan kuantitas penduduk dan kualitas penduduk.

Penduduk merupakan sumber dari timbulan sampah yang dihasilkan baik dalam jenis sampah domestik maupun sampah non domestik, sehingga kajian kependudukan merupakan hal yang penting diketahui guna melihat kecenderungan dan karakteristik timbulan sampah di Kota Bantaeng dari segala bentuk aktifitas yang dilakukan. Sebagai pencerminan dari jumlah timbulan sampah di suatu kota, penduduk memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap wilayah perkotaan. Kesadaran masyarakat kota, pola hidup, dan budaya lokal merupakan hal penting yang harus diperhatikan sehingga dalam manajemen pengelolaan persampahan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat setempat yang dapat memicu optimalnya pengelolaan sampah di perkotaan

2. Perumahan dan Permukiman di Kota Bantaeng

Perkembangan kawasan permukiman dapat ditandai dengan bertambahnya jumlah unit rumah dan atau meningkatnya luas lahan permukiman. Pesatnya pertumbuhan perumahan dan permukiman secara individu maupun perumahan yang terencana dan berskala besar, dapat mengakibatkan berubahnya fungsi lahan secara mendasar. Penyediaan perumahan secara terencana biasanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan serta memiliki estetika lingkungan yang lebih tertata. Akan tetapi pada kawasan permukiman yang tumbuh secara individu (alamiah) menempati lahan secara tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.

Proses pertumbuhan permukiman tersebut merupakan bagian yang sulit untuk dihindari, demikian halnya perkembangan perumahan dan permukiman di Kota Bantaeng mengalami permasalahan dalam hal upaya penataan maupun penyediaan lahan dan sarana pendukungnya. Sejauh ini intensitas perkembangan permukiman di Kota Bantaeng terus mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan jumlah penduduknya, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah rumah dan lahan peruntukan permukiman, serta tumbuh dan berkembangnya kawasan perumahan yang dibarengi dengan peningkatan nilai lahan.

Pertambahan jumlah rumah ataupun peningkatan lahan permukiman merupakan akibat dari perkembangan jumlah penduduk dan pembentukan wilayah secara makro baik yang terencana, maupun terbentuk dengan sendirinya. Perkembangan kawasan permukiman di Kota Bantaeng mengalami proses tersebut yang dilandasi oleh beberapa hal mendasar yaitu; (1) kecenderungan penduduk untuk tinggal secara berkelompok, (2) dekat dengan pelayanan sarana dan prasarana, (3) tinggal disekitar lingkungan kerja. Hal tersebut secara tidak langsung akan membentuk pola-pola permukiman yang tumbuh secara alami. Pola permukiman yang terbentuk di Kota Bantaeng antara lain; pola grid, pola linier dan pola menyebar. Masing-masing pola memiliki karakteristik tersendiri yang

terbentuk berdasarkan kondisi fisik lahan, karakteristik sosial masyarakat dan orientasi kegiatan perekonomian masyarakat.

Dengan sebaran potensi kawasan yang masih bersifat urban, maka hal ini sangat mempengaruhi orientasi penduduk mendirikan bangunan, baik yang bersifat permanen, semi permanen dan temporer. Melihat sosial budaya masyarakat jenis bangunan yang dibangun masyarakat untuk areal permukiman yang bersifat mengelompok, jenis bangunan yang didirikan berpareasi yang bercampur antara rumah permanen dan semi permanen.

Jika dilihat dari segi fungsi bangunan, sebagian besar bangunan digunakan sesuai peruntukannya sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Seiring dengan tuntutan kegiatan ekonomi masyarakat, beberapa bangunan yang statusnya sebagai rumah tempat tinggal dimanfaatkan sebagai tempat usaha dan hal ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu seluruh bangunan digunakan untuk usaha dan sebagian hanya digunakan sebagai tempat usaha.

3. Aspek Teknis Operasional

a. Timbulan Sampah (*Waste Generation*)

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota. Sedangkan pengertian timbulan sampah menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Berdasarkan identifikasi timbulan sampah di Kota Bantaeng yang diperoleh dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bantaeng, besaran timbulan sampah di daerah layanan persampahan di Kota Bantaeng adalah sekitar 119,58 M3/hari. Dari jumlah tersebut, hanya 82,09 m3 atau sekitar 68,6% sampah yang terangkut ke TPA berdasarkan pencatatan sampah di TPA, sedangkan sampah yang tidak terangkut adalah sebanyak 37,49 m3 atau sekitar 31,35%. sampah-sampah tersebut berasal dari berbagai sumber yaitu perumahan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Sampah yang ada di Kota Bantaeng belum di klasifikasikan berdasarkan sumbernya (domestik dan non domestik). Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan tersebut belum dirinci berdasarkan sumber sampahnya.

b. Pewadahan (*Onsite Storage*)

Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Wadah sampah individual umumnya ditempatkan di muka rumah atau bangunan lainnya. Sedangkan wadah sampah komunal ditempatkan di tempat terbuka yang mudah diakses. Sampah diwadahi sehingga memudahkan dalam pengangkutannya. Idealnya jenis wadah disesuaikan dengan jenis sampah yang akan dikelola agar memudahkan dalam penanganan berikutnya, khususnya dalam upaya daur-ulang. Pewadahan sampah di Kota Bantaeng adalah TPS dengan jumlah sebanyak 67 unit berupa pewadahan beton, dan container sebanyak 13 unit baik pada daerah permukiman maupun pada daerah komersil (pertokoan dan

pasar). Pewadahan sampah berupa kantong plastik disediakan sendiri oleh masyarakat, yang mana kantong plastik tersebut juga merupakan bagian dari sampah yang akan dibuang.

c. Pola Pengumpulan (*Collection*)

Sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan sampah dari sumber timbulan sampah sampai ketempat pengumpulan sementara/stasiun pemindahan atau sekaligus ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pola pengumpulan sampah di Kota Bantaeng berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada saat ini adalah terdiri dari beberapa pola pengumpulan yang ada, yaitu:

1) Pola Individual Langsung

Proses pengumpulan dengan cara mengumpulkan sampah dari setiap sumber sampah dan diangkut langsung ke TPA dengan menggunakan *dump truck* tanpa melalui proses pemindahan. Pola ini diterapkan karena kesederhanaan pengendaliannya, sesuai daerah pelayanan tidak luas dan tidak sulit dijangkau, di samping itu Kota Bantaeng merupakan kota kecil dan jarak ke TPA tidak terlalu jauh dari daerah pelayanan, dengan kondisi jalan yang cukup baik. Namun demikian, pola pengumpulan ini memakan waktu yang relatif lama, karena sampah dikumpulkan langsung dari setiap sumbernya dan alat pengangkut harus mengitari ruas jalan-ruas jalan yang ada.

2) Pola Individual Tidak Langsung

Pola pengumpulan ini dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah biasa dan gerobak sampah bermotor, dari setiap sumbernya sampah dikumpulkan dan diangkut yang kemudian dipindahkan/dikumpulkan di TPS berupa kontainer, dan setelah terisi penuh selanjutnya diangkut ke TPA dengan menggunakan arm-roll truck dengan sistem kontainer yang diangkat. Pola pengumpulan ini tidak bisa diterapkan pada keseluruhan daerah pelayanan, penyebabnya antara lain adalah karena terbatasnya armada pengumpul berupa gerobak sampah bermotor disamping kondisi jalan/gang yang sempit yang berada pada permukiman tidak teratur, sehingga sulit untuk mengoperasikan gerobak sampah sebagai alat pengumpul.

3) Pola Penyapuan Jalan

Proses pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan dibuang ke bak sampah terdekat atau dengan menggunakan gerobak jalan dan dibuang ke pewadahan terdekat pada ruas jalan tersebut. Kemudian dari setiap titik pewadahan langsung diangkut ke TPA dengan atau tanpa proses pemindahan. Pola penyapuan yang dilakukan hanya pada ruas jalan tertentu yang timbulannya relatif tinggi, terutama pada jalan-jalan utama dan hanya sebagian kecil jalan lingkungan serta pertokoan dan pasar yang dilayani pola pengumpulan sampah dengan pola penyapuan. Personil dalam pola

penyapuan disesuaikan dengan kemampuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Berikut adalah ruas jalan yang dilayani pada pola penyapuan tiap zona di Kota Bantaeng.

4) Pola Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah di Kota Bantaeng dilakukan dengan dua cara berdasarkan pola pengumpulan yang telah diuraikan diatas, yakni pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara (pola pengangkutan dengan sistem kontainer yang diangkat), dan pola pengangkutan langsung dari tempat sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Adapun jumlah peralatan pengangkutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Eksisting Peralatan pengangku Sampah Kota Bantaeng, Tahun 2020

NO	Jenis alat angkut	Jumlah	Kapasitas	Satuan	Ritasi	Jumlah Beroperasi
1	Truk Terbuka	3	3	(M ³)	2	3
2	Truk Compactor	2	4	(M ³)	2	2
3	Dump Truck	7	6	(M ³)	2	7
4	Arm Roll	3	5	(M ³)	2	3
5	Trailer Container	26	5	(M ³)	4	14

Sumber : BAPPEDALDA Kabupaten Bantaeng, Tahun 2021

4. Rencana Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bantaeng

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap sampah dihasilkan, terkait dengan proses penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilahan, pewadahan, pengumpulan, dan penampungan sementara. Bila salah satu dari proses kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah antara lain seperti dalam hal kesehatan, banjir/genangan, pencemaran air tanah, dan estetika. Proses kegiatan tersebut merupakan tinjauan salah satu aspek dalam pelaksanaan system pengelolaan sampah yaitu aspek teknis operasionalnya. Selain itu, system pengelolaan persampahan juga sangat terkait dengan bagaimana manajemen pelaksanaan itu dalam system kelembagaan pengelolaan sampah, aspek regulasi dan peraturan yang memayunginya, aspek retribusi dan pembiayaan dalam pengelolaannya, serta peran serta masyarakat dalam mendukung program pengelolaan persampahan yang lebih terpadu.

a. Sub Sistem Kelembagaan

Pemerintah Kabupaten Bantaeng mempunyai institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menangani masalah yang berkaitan dengan lingkungan, seperti sampah, air limbah, penghijauan dan taman kota, yaitu Dinas PU, Bapedalda dan Kebersihan. Khusus untuk masalah sampah, kewenangan ada di Bidang PU dan Bapedalda Kabupaten Bantaeng. Tugas Bidang ini adalah melaksanakan pengelolaan kebersihan.

Sedangkan fungsinya adalah merencanakan dan memantau mulai dari proses pembersihan dan pengangkutan sampah hingga pemrosesannya. Tugas pokok Seksi Pengolahan Persampahan di Bapedalda adalah mengawasi dan mengelola pembersihan sampah, termasuk juga mengumpulkan, memanfaatkan dan memusnahkan sampah. Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan adalah sebagai pengendali dan kontrol terhadap pengoperasian sarana persampahan yang ada dan bertugas untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan infrastruktur persampahannya. Sedangkan tugas pokok Seksi Pengangkutan adalah mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara ke Tempat Pemrosesan Sampah Akhir.

b. Sub Sistem Teknik Operasional

Sampai saat ini Bagian Kebersihan, Dinas Tata Ruang, Permukiman, Bapedalda dan Kebersihan Kabupaten Bantaeng hanya melayani hingga kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah perkotaan Kota Bantaeng. Akan tetapi tingkat pelayanan yang diberikan berbeda-beda, tergantung kondisi wilayahnya. Tingkat pelayanan yang rendah ada di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dengan sarana prasarana persampahan yang ada, seperti di daerah bantaran sungai atau daerah dengan kemiringan lahan yang cukup tinggi.

c. Pewadahan dan Pengumpulam

Tahap pertama operasional pengelolaan sampah adalah pewadahan pada tingkat sumber timbulan (masyarakat). Pewadahan dimaksudkan untuk mencegah sampah berserakan dan mempermudah proses pengumpulan. Tahap pewadahan dan pengangkutan sampah dari sumber hingga tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) adalah tanggung jawab setiap sumber sampah. Pada prakteknya, masyarakat menggunakan jasa pengangkut sampah untuk memindahkan sampahnya dari rumah tangga ke TPSS. Wadah yang dipakai memiliki berbagai jenis dan bentuk, antara lain tong sampah, bak permanen, dan kantong plastik, yang kemudian diangkut menggunakan motor sampah yang beroperasi untuk mengangkut sampah.

Dari hasil observasi diketahui bahwa pewadahan pada umumnya dilakukan tanpa pemisahan jenis sampah menjadi organik dan an-organik, namun sudah ada yang menyisahkan barang bekas untuk dijual atau diserahkan pada pengumpul barang-barang bekas. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk menyediakan wadah sampah terpisah di pinggir-pinggir jalan untuk pejalan kaki. Akan tetapi kurangnya edukasi kepada pejalan kaki menyebabkan mereka masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganiknya.

Tahap berikutnya setelah pewadahan adalah tahap pengumpulan. Operasional pengumpulan sampah rumah tangga dari sumber yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bantaeng dilaksanakan dengan banyak cara. Berdasarkan sarana pemindahan yang digunakan, seperti: TPSS, *container*, *transfer depo*, dikenal beberapa pola operasional pengumpulan/pemindahan yaitu: pola individual langsung, pola individual tidak langsung, pola komunal langsung dan pola komunal tidak langsung.

Operasional pengumpulan yang ada pada suatu kawasan pelayanan merupakan kombinasi pola-pola operasional pengumpulan menurut sumber sampahnya. Sistem TPSS adalah yang paling banyak dipakai saat ini. Akan tetapi untuk operasionalnya tidak mudah, karena membutuhkan sarana pengambilan sampah dan tenaga kerja yang relatif lebih banyak. Untuk saat ini, sistem yang dianjurkan adalah pola *door to door* dan jemput bola karena operasionalnya mudah, murah, dan cepat. Hanya saja dalam sistem ini perlu kerjasama dari petugas dan masyarakat untuk mentaati jam pengambilan sampah yang sudah ditetapkan. Beberapa bentuk tempat pengumpulan dan pewadahan sampah yang dapat direncanakan antara lain sebagai berikut:

- a) Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), yaitu bak dengan konstruksi dari bata tanpa atap yang diberi lubang pintu dengan atau tanpa pintu. Ukuran rata-rata 3 m³. Penempatannya diupayakan dekat dengan sumber timbulan sampah. Penggunaan TPSS pada umumnya tidak disukai karena alasan lingkungan, estetika, dan operasional yang tidak praktis (perlu waktu yang relatif cukup lama dan banyak tenaga).
- b) Container, yaitu bak dengan konstruksi dari kayu, besi atau baja yang diberi pintu dan jendela, dengan volume 6 m³. Karakteristik container adalah : cocok digunakan pada sumber sampah yang besar, dapat diletakkan pada banyak tempat dan dapat dipindah-pindahkan, memerlukan lahan penempatan yang luas, operasional pemindahan dan pengangkutan mudah dan cepat. Dalam prakteknya, sarana ini belum digunakan dengan benar. Pemindahan sampah dari gerobak masih sulit dilakukan karena desain bak yang kurang nyaman digunakan. Sehingga petugas membongkar sampah di luar bak, akibatnya lokasi container menjadi kotor dan tidak sehat. Diperlukan evaluasi untuk perbaikan rancang bangun container.

d. Pengangkutan Sampah

Keberhasilan penanganan sampah bisa dilihat dari efektivitas dan efisiensi pengangkutan sampah dari sumber ke TPS hingga ke TPA. Pengangkutan tidak boleh ditunda karena hal ini akan menambah beban pengangkutan berikutnya dan beresiko menimbulkan gangguan kenyamananlingkungan di sekitar tempat penyimpanan/penampungan.

Tahap ini penting karena banyak alokasi biaya, waktu, tenaga, dan koordinasi tepat yang dibutuhkan. Evaluasi dan perencanaan terhadap jenis sarana, jadwal operasi, dan rute pengangkutan merupakan hal penting dalam pengangkutan. Ada beberapa jenis sarana pengangkutan sampah yang digunakan di wilayah jangkauan pengelolaan persampahan di Kota Bantaeng, antara lain yaitu:

- a) *Truck* biasa. Kendaraan jenis ini masih digunakan di Kota Bantaeng. Pemakaiannya tidak praktis karena proses bongkar muat sampah perlu waktu lama dan tenaga lebih banyak. Kelebihannya adalah pada kapasitas tampung yang besar (16 m³) dan harga yang relatif lebih murah dari jenis lainnya. Operasionalisasi kurang lebih sekitar 1-2 rit/hari.

- b) *Dump Truck*. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari truck biasa, bak truck dapat digerakkan secara hidrolik sehingga proses bongkar muat sampah bisa efektif, sedangkan lama operasionalisasi sama dengan truck biasa. Bak terbuat dari baja dengan kapasitas bervariasi yaitu sekitar kurang lebih 8 m³, harganya relatif lebih mahal dari truck biasa dengan kapasitas operasional adalah 2-3 rit perhari. Jenis kendaraan ini digunakan pada pola operasional sistem *door to door*, jemput bola, transfer depo, dan juga sistem TPSS atau container yang berfungsi sebagai TPSS.
- c) *Arm-Roll Truck*. Yaitu truck tanpa bak dengan lengan hidrolik untuk menggerakkan container. Dengan kendaraan ini, operasi pengangkutan dan pembuangan sampah menjadi lebih praktis. Bentuk dan ukurannya bervariasi menurut container. Harga kendaraan relatif lebih mahal dari *dump truck*. Kapasitas operasional adalah 4-6 rit perhari, tergantung pada jarak pengangkutan.
- d) Lain-lain (mobil *pick-up*, motor roda 3 dan sepeda sampah. Sarana pengangkutan lainnya yang biasa digunakan untuk pengangkutan sampah di wilayah pelayanan Kota Bantaeng adalah mobil jenis *pick-up*, motor roda 3 dan sepeda sampah, yang biasanya digunakan secara regular juga dan untuk melayani sampah pada wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut sampah pada umumnya.

e. Sistem Pemrosesan Akhir

Sistem pengelolaan sampah di lingkup wilayah pelayanan Kota Bantaeng berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah dari Kota Bantaeng, baik sampah organik maupun sampah anorganik, bahkan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya), dibuang ke Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA).

Lokasi TPA yang ada saat ini merupakan lokasi TPA yang baru dan dalam tahap penyelesaian konstruksi untuk dapat dimanfaatkan segera, mengingat kebutuhannya juga sangat mendesak. TPA ini nantinya dimiliki secara otonom dan dikelola secara langsung di bawah administrasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait yang menanganinya.

f. Sub Sistem Pembiayaan dan Retribusi

Sumber dana untuk kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantaeng berasal dari APBN, APBD, dan swasta. Dana yang berasal dari APBN pada umumnya digunakan untuk pengadaan barang/investasi, misalnya pengadaan jembatan timbang di TPSA, dump truck, arm-roll dan incenerator. Dana yang berasal dari APBD, pada umumnya digunakan untuk biaya operasional/pemeliharaan rutin. Dana dari swasta pada umumnya berwujud sumbangan peralatan kebersihan, seperti gerobak sampah dan tong sampah.

Sumber pendanaan pengelolaan sampah selain APBD juga hasil retribusi jasa pelayanan persampahan yang berasal dari konsumen (masyarakat). Umumnya ketersediaan dana pemerintah untuk menangani persampahan sangat kecil, demikian halnya dengan perolehan yang

bersumber dari retribusi. Rata-rata retribusi yang diperoleh Rp 3.000 per bulan per konsumen. Kedua sumber pendanaan tersebut masih jauh dari biaya yang diperlukan untuk mengelola pelayanan sampah.

Selain penyediaan dana yang relatif terbatas, ketimpangan pengelolaan sampah juga sering diperburuk dengan banyaknya retribusi yang tertunggak, hingga menyebabkan terganggunya pelayanan kebersihan sampah.

g. Sub Sistem Regulasi

Sistem pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Bantaeng merujuk pada Perda tentang Pengelolaan Kebersihan. Adapun yang menyangkut pengaturan pengelolaan sistem persampahan dijelaskan antara lain meliputi :

- 1) Penggolongan jenis sampah menjadi sampah organik dan anorganik;
- 2) Sifat sampah;
- 3) Tanggung jawab pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
- 4) Kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah meliputi: pemeliharaan kebersihan di lingkungan, pemilahan sampah menurut jenisnya, pengangkutan sampah dari sumber ke TPSS, penyediaan tempat sampah di dalam persil.
- 5) Kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah meliputi : pengumpulan & pengangkutan ke TPSA sampah di jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kota dan lapangan terbuka, pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA, pemusnahan/pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

h. Sub Sistem Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam hal pembayaran retribusi cukup bagus. Akan tetapi peran serta dalam hal keterlibatan dalam teknis operasional pengelolaan sampah masih sangat kurang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan warga dalam menaati jam pembuangan sampah. Selain itu, masyarakat juga masih sangat sedikit yang mau melaksanakan pemilahan sampah di tingkat sumber (rumah tangga). Hal ini menyebabkan volume sampah yang harus dikelola Pemerintah sangat besar, yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar pula.

Hambatan dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam (internal) dan hambatan dari luar (eksternal). Hambatan dari dalam masyarakat adalah apakah masyarakat memang ingin terlibat dan kemudian masyarakat mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka. Juga dari kondisi dan karakteristik masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat perekonomian, tingkat pendidikan dan unsur kepercayaan. Hambatan dari luar masyarakat terutama muncul karena belum adanya sinkronisasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, selain juga karena kurangnya sosialisasi. Selain itu, hambatan dalam partisipasi yang muncul adalah

kemampuan membayar masyarakat, serta pola kehidupan masyarakat dan birokrasi pengaduan pelayanan. Masyarakat dengan kondisi kemampuan keuangan yang terbatas, relatif kecil harapan untuk mereka dapat berpartisipasi.

D. KESIMPULAN

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas di dalamnya. Secara umum, daerah perumahan yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut :

- 1) Seluruh masyarakat memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari;
- 2) Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar;
- 3) Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diareha, thypus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air, atau tanah; dan
- 4) Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya.

Kondisi tersebut di atas akan dapat tercapai bila visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan Permukiman sehat yang bersih dari sampah.

Kondisi tersebut merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dimasa depan secara mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pengelolaan persampahan. Selanjutnya, visi tersebut di atas selanjutnya dirumuskan dalam beberapa misi sebagai terjemahan lebih lanjut arti visi yang telah ditetapkan, sehingga dapat diidentifikasi arah kebijakan yang akan ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar (1990). Defenisi Pengelolaan Sampah. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azwar (2002). Potensi Daur Ulang Persampahan. Jakarta Amos Noelaka (2008:67), Jenis, Sumber dan Karakteristik Sampah Rumah Tangga, Engenering, London.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantaeng Tahun 2021.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Bantaeng Dalam Angka.
- Damanhuri, E. 1995. Diktat Kuliah Statistika. ITB. Bandung.
- Damanhuri dan Padmi, (2004).Diktat Pengelolaan Sampah. Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB): Bandung.

Soemirat Slamet, (2009:153). Jenis Dan Karakteristik Sampah. Jogjakarta. Suryono dan Budiman (2010), Sistem 3R, Institut Teknologi Bandung. SNI 19-3964-1994. Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan komposisi Sampah Perkotaan.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah